

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tasikmalaya merupakan sebuah daerah yang memiliki sebagian besar tatanan sosial yang bernuansa islami. Baik dari kalangan atas sampai ke bawah, semua kelas tersebut secara substantif masuk dalam pengklasifikasian kaum santri. Paradigma berpikir yang dimiliki masyarakat juga mengacu kepada Islam tradisional. Nilai-nilai kepercayaan lokal yang biasanya mendominasi pada kebudayaan Jawa, justru tidak muncul pada kebudayaan Sunda. Tasikmalaya sebagai bagian dari kebudayaan Sunda justru memiliki masyarakat dengan pertumbuhan Islam yang pesat. Beberapa pondok pesantren banyak yang berdiri di Tasikmalaya. Sebutan Tasikmalaya sebagai kota santri seolah membudaya secara historis.

Perkembangan Sosial-politik di Tasikmalaya merupakan salah satu peristiwa lokal penting dan menjadi variabel pendukung majunya masyarakat pribumi di era politik etis. Saat itu, Tasikmalaya termasuk ke dalam wilayah Afdeling B atau tepatnya di wilayah Priangan Timur. Organisasi-organisasi besar mencoba menancapkan pengaruh awalnya di tasikmalaya. Paguyuban pasundan merupakan contoh dari pengaruh besar sebuah organisasi di Tasikmalaya. Organisasi ini memberi kontribusi bukan hanya dalam meningkatkan perkembangan politik semata, namun juga mampu memberikan perkembangan sosial di priangan timur. Diaspora masuknya Organisasi secara tidak langsung mampu membentuk perubahan baru dalam hal sosial seperti, mobilisasi sosial, peningkatan tahap kehidupan, dan keadaan ekonomi masyarakat Tasikmalaya. Sarekat Islam memiliki pengaruh yang hampir sama dengan paguyuban pasundan di tasikmalaya. Latar belakang sosial Tasikmalaya tidak terlepas dari nuansa islam yang dilihat dari pesantren yang banyak didirikan. Pesantren tersebut menjadi role model dari masyarakat lokal dalam membentuk paradigma islam tradisional. Latar belakang sosial tersebut juga didorong oleh corak kelas yang masih bersifat tradisional.

Sarekat Islam yang terbentuk di Surabaya dan Solo saat itu memang sudah mampu meluaskan pengaruhnya sampai ke priangan. Salah satu cabang Organisasi ini adalah Sarekat Islam (SI) Tasikmalaya yang memiliki anggota cukup banyak.

Sampai tahun 1916, Sarekat Islam Tasikmalaya memiliki anggota sekitar 1.200 orang. Anggota sebanyak itu membuat Sarekat Islam Tasikmalaya menempati posisi ketiga di seluruh Priangan setelah Sarekat Islam Cianjur (8.000 anggota) dan Sarekat Islam Bandung (1.500) anggota. Gambaran tersebut dapat dilihat pada beberapa cabang Sarekat Islam Tasikmalaya yang memiliki anggota bawah 1.000 orang, antara lain Sarekat Islam Majalaya memiliki anggota sebanyak 582 orang dan Sarekat Islam Manonjaya memiliki anggota sebanyak 500 orang. Anggota sebanyak itu menunjukkan bahwa masyarakat tasikmalaya memberikan respon positif terhadap Sarekat Islam karena mereka menaruh harapan yang tinggi kepada Organisasi pergerakan yang paling radikal pada masa itu.

Perkembangan pesat Sarekat Islam di Tasikmalaya membuat pemerintah Hindia Belanda merasa khawatir. Hal tersebut tidaklah berlebihan di karenakan beberapa anggota Sarekat Islam Afdeeling B berangkat ke Cimareme untuk membantu H. Adrai (penasihat Sarekat Islam Manonjaya) dan H.Hasan melancarkan perlawanan kepada pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1919. Berkaitan dengan peristiwa Cimareme, Asisten Resident Voet menyatakan bahwa Afdeeling tasikmalaya merupakan salah satu pusat pergerakan Sarekat Islam Afdeeling B di priangan timur bersama-sama dengan Afdeeling Garut. Berdasarkan jejak Sarekat Islam di Priangan Timur, peneliti berasumsi bahwa sangat penting untuk mengkaji sejarah Sarekat Islam di Tasikmalaya (Salam, 2017). Organisasi tersebut menandai terjadinya perubahan kelas dari elit tradisional ke elit modern. Selain perubahan tersebut, perlawanan masyarakat lokal berubah juga dari yang bersifat separatistis ke diplomatis. Organisasi tersebut secara tidak langsung menjadi agen perubahan meliputi fungsi sebagai aspirasi bagi masyarakat lokal Tasikmalaya. Dari sekian banyak organisasi tersebut, organisasi Paguyuban Pasoendan dan Sarekat Islam adalah 2 organisasi yang memiliki pengaruh dan eksistensi secara signifikan di Tasikmalaya.

Paguyuban Pasoendan (PP) didirikan 20 juli 1913 di Jakarta. Paguyuban Pasoendan baru mendirikan cabangnya sampai ke Tasikmalaya pada tahun 1915. Kiprah Paguyuban Pasoendan yang gemilang sekitar tahun 1920an di Tasikmalaya menjadi inspirasi bagi cabang di daerah lainnya. kiprah gemilang tersebut tak lepas

dari sosok pemimpin yang bernama Ahmad Atmadja. Ahmad Atmadja merupakan ketua Paguyuban Pasoendan di Tasikmalaya. Lewat kepemimpinan dari Atmadja, Paguyuban Pasoendan mampu berkontribusi dalam mengembangkan taraf sosial masyarakat Tasikmalaya. Ahmad Atmadja pada masa kepemimpinannya juga mendirikan sebuah perhimpunan bernama Bale Pawulangan Pasundan (BPP). Perhimpunan tersebut menjadi kepanjangan tangan dari organisasi Paguyuban Pasundan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pendidikan modern.

Sarekat Islam yang dulunya terkenal sebagai Sarekat Dagang Islam dibentuk pada tahun 1909 oleh seorang siswa lulusan OSVIA bernama Tirto Adisurjo di Batavia. Tirto Adisurjo mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia. Organisasi tersebut dimaksudkan untuk membantu pedagang-pedagang bangsa Indonesia dalam menghadapi persaingan pedagang Cina. Sarekat Islam berdiri tiga tahun setelah Budi Utomo, yaitu pada tahun 1911 di Solo. Terbentuknya Organisasi Sarekat Islam merupakan isyarat bagi umat muslim dalam upaya menunjukkan kekuatannya. Tujuan dari didirikannya Sarekat Islam tidak semata-mata untuk membuat *front* perlawanan terhadap orang Cina, melainkan untuk melawan semua penghinaan terhadap rakyat bumiputra. Selain itu, terbentuknya organisasi Sarekat Islam merupakan suatu reaksi terhadap suatu rencana *krestenings-politiek* (politik pengkristenan) dari kaum zending.

Pokok utama perlawanan Sarekat Islam ditunjukkan terhadap setiap bentuk penindasan dan kesombongan rasial. Berbeda dengan Budi Utomo yang merupakan organisasi dari *ambtenar-ambtenar* pemerintah. Corak organisasi Sarekat Islam bersifat terbuka. Sifat tersebut mampu mengembangkan ruang organisasi sampai pada lapisan bawah masyarakat pribumi. Masyarakat lapisan bawah sebelumnya hampir tidak mengalami perubahan dan paling banyak mengalami penderitaan. Hal itu dapat dilihat dari anggaran dasarnya yaitu: mengembangkan jiwa berdagang, memberi bantuan kepada anggota-anggota yang menderita kesukaran, memajukan pengajaran dan semua yang mempercepat naiknya derajat bumiputra, dan menentang pendapat-pendapat yang masih keliru tentang agama Islam. Berdasarkan anggaran tersebut, maka Sarekat Islam secara terang-terangan tidak

bercorak Politik. Melainkan dari seluruh aksi perkumpulan itu dapat dilihat bahwa Sarekat Islam tidaklah lain bertujuan untuk melaksanakan suatu tujuan ketatanegaraan dan memperjuangkan keadilan sosial secara gigih.

Pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu menghadapi situasi yang rumit dengan beberapa gerakan politik pribumi yang mulai terkontaminasi ke dalam unsur-unsur revolusioner. Pemerintahan Hindia Belanda menempuh jalan hati-hati dengan mengirimkan salah seorang penasihatnya kepada Organisasi tersebut. Saat itu Sarekat Islam tidak boleh berupa Organisasi yang mempunyai pengurus besar, melainkan hanya diperbolehkan berdiri secara lokal. Sangat berbeda dengan partai lainnya, kecepatan tumbuhnya Sarekat Islam bagaikan meteor dan meluas secara horizontal sehingga Sarekat Islam merupakan Organisasi massa yang pertama di Indonesia. Pada tahun 1917-1920, Organisasi Sarekat Islam sangat terasa pengaruhnya dalam politik Indonesia.

Era pergerakan nasional menjadi tonggak perubahan sosial dan politik bagi masyarakat pribumi. Kebijakan politik etis yang dipeloporkan oleh van deventer pada awal abad ke-20 mampu memberikan stimulan bagi masyarakat pribumi khususnya dalam bidang pendidikan. Sebelum kebijakan tersebut diterapkan, pendidikan hanya diperkenalkan untuk kalangan atas pribumi saja. Kaum bawah pribumi hanya mampu mengenyam pendidikan tradisional saja. Pendidikan tradisional tersebut tidak mampu memberikan pencerahan dalam hal menyamakan persepsi nasional. Pendidikan baru diterapkan di hindia belanda pada pertengahan abad ke-19. Pendidikan tersebut masih terbatas bagi bangsawan eropa saja. Masyarakat pribumi hanya disediakan pendidikan dasar seperti pengenalan bahasa dan tata perilaku (Kartodirjo, 2015: 115-116).

Ketersediaan pendidikan yang berbasis tradisional menjurus kepada mengendapnya paradigma berpikir tradisional. Kondisi tradisional masih tumbuh pada masyarakat sampai abad ke-20. Berpikir tradisional tersebut menunjukkan sikap yang masih percaya akan hal yang bersifat mistika dan tidak logis. Salah satu contoh gejala yang muncul yaitu percaya akan adanya ramalan ratu adil yang mampu memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Masyarakat pada masa tersebut mengabaikan tindakan logis ditengah kolonialisme Hindia Belanda.

Mereka melakukan tindakan berdasarkan arahan dari junjungan yang dipercaya tersebut (Kartodirjo, 1984: 51-53).

Perkembangan Organisasi Politik di Indonesia tidak terlepas dari periode awal pergerakan Nasional. Pergerakan Nasional identik dengan peristiwa kebangkitan Nasional. Kebangkitan Nasional bermula dari terbentuknya Budi Utomo sebagai Organisasi politik pribumi pertama di Hindia Belanda. Peristiwa tersebut terjadi dikarenakan adanya wacana kebijakan politik etis yang dicetuskan oleh Van deventer. Politik etis atau garis politik Kolonial digaungkan pertama kali pada tahun 1891. Van Deventer selaku anggota parlemen mengungkapkan bahwa sudah seharusnya pemerintahan belanda memisahkan anggaran antara Hindia Belanda dan Belanda. Selain itu, pemerintahan Belanda memiliki hutang balas budi kepada masyarakat pribumi atas pendudukan yang dilakukan beberapa tahun lamanya. Pada rapat parlemen, Van Deventer mencetuskan beberapa poin penting mengenai politik etis seperti kemajuan rakyat, desentralisasi, kesejahteraan rakyat dan ekspansi yang pada umumnya menuju kesatuan politik yang konstruktif (Ricklefs, 2013: 355-367).

Perjuangan untuk melancarkan politik kolonial yang progresif diteruskan oleh Van Kol, C. Th. Van deventer, dan P. Brooschooft. Van Kol yang pada saat itu menjadi juru bicara golongan sosialis menggunakan pengalamannya di Indonesia untuk melancarkan kritik terhadap keadaan merosot di Indonesia. Selain itu, Broschooft menyatakan bahwa selama satu abad lebih pemerintah mengambil keuntungan dari penghasilan rakyat.

Permasalahan tersebut menjadikan pemerintahan Hindia Belanda memiliki kewajiban moral untuk berbalas budi kepada masyarakat pribumi. Terdapat tiga poin penting yang diajukan oleh Van Deventer dalam mengembangkan kebijakan politik etis yaitu edukasi, migrasi, dan irigasi. Ketiga poin tersebut memberikan dampak yang sangat signifikan, salah satunya pada bidang edukasi. Penerapan Pendidikan pada masyarakat pribumi terbagi ke dalam dua kelas yaitu sekolah kelas I dan sekolah kelas II. Sekolah kelas II diperuntukkan bagi masyarakat desa yang kurang mampu. Sekolah ini biasanya disebut sekolah desa (*dessa school*). Sekolah ini hanya menyediakan pelajaran membaca dan menulis menggunakan bahasa

melayu. Sekolah kelas II dibangun dengan tujuan untuk memenuhi ketersediaan tenaga kerja. Sedangkan sekolah kelas I diperuntukkan bagi masyarakat pribumi kelas atas (Ricklefs, 2013: 355-367).

Golongan yang termasuk klasifikasi kelas atas diantaranya priyayi, bangsawan, pejabat pemerintahan, dan saudagar. Sekolah kelas I sudah menggunakan sistem pendidikan Eropa. Mata pelajaran yang disediakan pada sekolah tersebut yaitu ilmu alam, ilmu bumi, membaca, menulis, berhitung, sejarah, dan menggambar. Sekolah kelas I tidak memiliki jenjang yang terbatas seperti sekolah kelas II. Sekolah kelas I mampu meneruskan jenjang sampai ke Eropa. Bahkan, institusi bertaraf perguruan tinggi sudah dibangun pada kisaran tahun 1900an. Golongan pribumi kelas atas yang menduduki pendidikan di jenjang sekolah kelas I membentuk kelas baru yang disebut sebagai kaum intelektual. Kaum intelektual bukan saja menciptakan jurang perbedaan dengan kaum pribumi lainnya. Namun, kaum intelektual mampu membentuk paradigma perlawanan baru untuk membebaskan belenggu jajahan yang ada nusantara. Berbagai kaum intelektual membentuk Organisasi politik secara variatif yang bertujuan untuk mengkordinasikan tujuan atau konsep menjadi satu.

Perkembangan kaum intelektual di tahun 1900 memunculkan babak baru dinamika politik bagi masyarakat pribumi di Hindia Belanda. Salah satu Organisasi politik yang berpengaruh dalam mengkonsolidasikan masyarakat pribumi bernama Sarekat Islam. Berdasarkan peristiwa sejarah tersebut, peneliti mulai merumuskan fokus penelitian berupa perkembangan organisasi Sarekat Islam di Tasikmalaya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah “Bagaimana perkembangan organisasi Sarekat Islam di Tasikmalaya 1911-1920”.

1.3. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu tahap penelitian yang bertujuan untuk memperjelaskan konsep penelitian agar tidak mendapatkan kesalahpahaman. Dalam hal ini, peneliti merasa perlu mendefinisikan istilah yang terkandung pada topik masalah yang penulis buat sebagai berikut :

Sarekat Islam merupakan organisasi islam yang memiliki masa yang besar. Sarekat Islam berbeda dengan organisasi lainnya dalam hal rekrutmen. Masa dari Sarekat Islam tidak terbatas pada golongan dan kelas masyarakat lapisan kalangan bahwa mampu menjadi anggota Sarikat Islam keterbukaan dari Organisasi tersebutlah yang menjadi alasan peneliti untuk menjadikan Sarikat Islam sebagai fokus penelitian. fokus penelitian pada Sarekat Islam dikerucutkan di Tasikmalaya. Tasikmalaya dipilih oleh peneliti sebagai objek dengan alasan untuk mengetahui pengaruh Sarekat Islam di priangan.

1.4. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian pasti ada tujuan yang hendak dicapai yang dapat memberikan manfaat, baik bagi peneliti, institusi, dan bagi pembendaharaan ilmu pengetahuan untuk itu penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya Sarekat Islam di Tasikmalaya pada Tahun 1911-1920.
2. Untuk mengetahui perkembangan Sarekat Islam di Tasikmalaya Pada Tahun 1911-1920.
3. Untuk mengetahui dampak dari perkembangan Sarekat Islam di Tasikmalaya Pada Tahun 1911-1920.

1.5. Manfaat Penelitian

1) Kegunaan Teoretis

Bagi perkembangan disiplin ilmu, penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan kepenulisan sejarah lokal.

2) Kegunaan Praktis

Bagi penulis, memperluas Cakrawala berpikir secara komprehensif dan menambah pemahaman berbagai ilmu yang terkait di dalamnya tentang perkembangan organisasi Sarekat Islam di Tasikmalaya tahun 1911-1920. Bagi pembaca, menambah pengetahuan dan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan organisasi Sarekat Islam di Tasikmalaya tahun 1911-1920. Program studi Sejarah, diharapkan hasil penulisan skripsi ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam penulisan Sejarah mengenai perkembangan organisasi Sarekat Islam di Tasikmalaya pada tahun 1911-1920.

3) Kegunaan Empiris

Seacara praktiknya atau manfaat untuk penelitian ini, dapat dijadikan sebagai acuan dalam perkembangan penelitian pada ranah akademik.

